

# DAMPAK KELANGKAAN BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN MOBILITAS MASYARAKAT DI INDONESIA: KAJIAN PUSTAKA KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

*The Impact of Fuel Shortages on Economic Stability and Public Mobility in Indonesia: A Literature Review of National Energy Policy*

Loso Judijanto<sup>1\*</sup>, Abdul Jalil Hutagalung<sup>2</sup>, Era Purike,<sup>3</sup>

<sup>1</sup> IPOSS Jakarta

<sup>2</sup> Universitas Alwashliyah

<sup>3</sup> Prodi Perhotelan Politeknik Pajajaran ICB Bandung

\*Email Correspondence: [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com), [jalilhutagalung@gmail.com](mailto:jalilhutagalung@gmail.com), [era.purike@poljan.ac.id](mailto:era.purike@poljan.ac.id)

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 17-05-2026

## Abstract

*The fuel shortage in Indonesia has far-reaching implications for economic stability and public mobility, whilst also highlighting the limitations of national energy policy in addressing excessive reliance on fossil fuels. This literature review examines how supply pressures, price rises and fuel subsidies trigger inflation, place a strain on the state budget, disrupt the real sector and undermine the investment climate, thereby reducing macroeconomic resilience. On the other hand, fuel shortages also hinder public mobility, particularly in terms of access to education, healthcare, employment and social activities, whilst widening socio-economic disparities. This article concludes that the sustainability of economic stability and social mobility requires the strengthening of national energy policies that are more oriented towards energy diversification, efficiency and the enhancement of more energy-efficient public transport modes.*

**Keywords:** *fuel scarcity, economic stability, public mobility, national energy policy, energy security, inflation, fuel subsidies.*

## Abstrak

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sekaligus menyoroti keterbatasan kebijakan energi nasional dalam mengatasi ketergantungan berlebihan terhadap energi fosil. Kajian pustaka ini menelaah bagaimana tekanan pasokan, kenaikan harga, dan subsidi BBM memicu inflasi, membebani anggaran negara, mengganggu sektor riil, dan menurunkan iklim investasi, sehingga mengurangi ketahanan ekonomi makro. Di sisi lain, kelangkaan BBM juga menghambat mobilitas masyarakat, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan aktivitas sosial, serta memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan stabilitas ekonomi dan mobilitas sosial memerlukan penguatan kebijakan energi nasional yang lebih berorientasi pada diversifikasi energi, efisiensi, dan penguatan moda transportasi umum yang lebih hemat energi.

**Kata Kunci:** kelangkaan bahan bakar minyak, stabilitas ekonomi, mobilitas masyarakat, kebijakan energi nasional, ketahanan energi, inflasi, subsidi BBM.

## PENDAHULUAN

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia telah menjadi persoalan berulang yang berdampak luas pada sendi-sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menggambarkan keterbatasan fisik pasokan tetapi juga mencerminkan kerapuhan dalam struktur ketergantungan energi nasional terhadap BBM berbasis fosil. Ketergantungan berlebihan terhadap BBM menjadikan stabilitas ekonomi nasional rentan terhadap *supply shock* global, seperti kenaikan harga minyak dunia atau gangguan geopolitik di kawasan Timur Tengah (Solow, 1956). Dalam konteks Indonesia,

keterbatasan cadangan BBM yang diperkirakan hanya cukup sekitar 20 hari memperbesar risiko ketidakpastian pasokan dan inflasi (RIDIA MAHARANI, 2021).

Dari sisi ekonomi makro, kenaikan harga BBM dan kelangkaan pasokan cenderung mendorong inflasi karena meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang serta jasa (Ravallion, 2016). Penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, menjadi konsekuensi langsung yang dapat memperlebar ketimpangan dan mengganggu keseimbangan pertumbuhan ekonomi (Amanda et al., 2023).

Di sektor riil, sejumlah laporan menunjukkan bahwa kelangkaan BBM yang sempat terjadi di SPBU swasta pada 2025 mengganggu aktivitas logistik, industri, dan perdagangan di kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya. Keterlambatan pengiriman bahan baku dan produk jadi berpotensi menurunkan produktivitas dan menaikkan biaya operasional, sehingga berdampak pada daya saing pelaku usaha (Elfita et al., 2025).

Pada tataran mikro, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan BBM. Pedagang keliling, penjual sayur, dan pelaku usaha berbasis transportasi mengalami penurunan frekuensi penjualan akibat kesulitan mendapatkan bahan bakar dan peningkatan biaya operasional, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga barang di pasar tradisional. Selain stabilitas ekonomi, mobilitas masyarakat juga terganggu secara signifikan saat BBM menipis. Antrean panjang di SPBU, kenaikan harga jual eceran, dan pengurangan jam operasional stasiun bahan bakar membatasi akses masyarakat untuk bekerja, berpendidikan, dan mengakses layanan Kesehatan (Qabil et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa BBM bukan semata komoditas ekonomi, tetapi juga infrastruktur vital mobilitas sosial-ekonomi.

Kelangkaan BBM juga memunculkan perilaku ekonomi reaktif seperti *panic buying* dan penimbunan bahan bakar di tingkat individu, yang justru mempercepat habisnya stok dan memperburuk krisis pasokan (Amanda et al., 2023). Dinamika psikologis ini menunjukkan bahwa interaksi antara kebijakan, pasar, dan perilaku masyarakat dapat memperkuat efek negatif dari keterbatasan material.

Dalam kerangka kebijakan energi nasional, pemerintah Indonesia telah merumuskan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menekankan diversifikasi energi, penguatan energi baru dan terbarukan, serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi (PP No. 79/2014). Arah strategis ini secara teoretis bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang (Sa'diyah et al., 2025). Namun, praktik implementasi kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan antara arah strategis nasional dan kenyataan operasional di lapangan, termasuk disparitas pasokan BBM antara SPBU pemerintah dan swasta, serta dinamika regulasi impor yang memicu kelangkaan di sejumlah wilayah. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak hanya berbicara tentang komposisi bauran energi, tetapi juga tentang tata kelola distribusi dan keadilan akses (Amanda et al., 2023).

Dengan demikian, kebijakan energi nasional dan dampak kelangkaan BBM di Indonesia dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian fokus pada aspek makro, seperti harga, inflasi, dan saldo fiskal, serta sedikit yang mengintegrasikan analisis mobilitas sosial dan keterjangkauan untuk kelompok rentan (Elfita et al., 2025). Hal ini membuka *research gap* untuk memadukan kajian keseimbangan ekonomi makro dengan dimensi sosial-spasial mobilitas masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kelangkaan BBM memengaruhi stabilitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Indonesia, dengan mengacu pada kebijakan energi nasional, terutama RUEN, serta regulasi harga dan subsidi BBM.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis terhadap jurnal nasional dan internasional, buku dan dokumen lainnya terkait kelangkaan BBM, kereaktifan ekonomi, dan kebijakan energi nasional Indonesia (Zed, 2008); (Eliyah & Aslan, 2025). Maka dengan itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi diskusi akademik dan formulasi kebijakan yang lebih responsif dalam membangun ketahanan energi, menstabilkan ekonomi, serta menjaga mobilitas sosial masyarakat di tengah tekanan ketergantungan terhadap BBM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Kelangkaan BBM terhadap Stabilitas Ekonomi

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dapat dipahami sebagai *supply shock* yang mengganggu keseimbangan pasar energi dan memicu ketidakpastian ekonomi jangka pendek. Ketika penawaran BBM menyusut sementara permintaan tetap tinggi, tekanan harga dan gangguan distribusi menjadi konsekuensi langsung yang mengikis stabilitas ekonomi makro (Ravallion, 2016).

Dalam kerangka ekonomi makro, kenaikan harga atau keterbatasan pasokan BBM cenderung mendorong laju inflasi melalui kenaikan biaya transportasi, logistik, dan distribusi barang (Elfita et al., 2025). Kenaikan biaya ini kemudian merembet ke harga barang dan jasa lain, sehingga menaikkan indeks harga konsumen dan menurunkan daya beli masyarakat. Data perkiraan cadangan BBM yang hanya cukup sekitar 20 hari menyoroti kerapuhan ketahanan energi nasional dan meningkatkan risiko gelombang kenaikan harga jika kondisi global memburuk (RIDIA MAHARANI, 2021). Keterbatasan stok ini memperupah respons pemerintah, karena penyesuaian subsidi atau harga BBM berpotensi mempercepat tekanan inflasi jika tidak diimbangi kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati (ESDM, 2017).

Pada sektor riil, kelangkaan BBM yang sempat terjadi di SPBU swasta pada 2025 menunjukkan gangguan nyata pada mobilitas logistik, aktivitas industri, dan perdagangan di kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya. Keterlambatan pengiriman bahan baku dan produk jadi berkontribusi pada kenaikan biaya produksi, penurunan efisiensi, dan potensi penurunan output. Bagi sektor transportasi dan logistik, kelangkaan BBM menaikkan biaya operasional angkutan, baik umum maupun komersial (Melinda et al., 2024). Kenaikan biaya ini pada akhirnya dialihkan ke konsumen melalui penyesuaian tarif, sehingga penumpang dan pelaku usaha menghadapi tekanan ganda berupa inflasi dan pengurangan akses layanan transportasi (Ramadania et al., 2026).

Dampak paling nyata juga terlihat pada rantai pasokan (*supply chain*), di mana kelangkaan BBM menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku dan produk jadi ke berbagai pusat distribusi. Gangguan ini tidak hanya mengurangi kelancaran distribusi tetapi juga memicu kekurangan barang di pasar, yang pada gilirannya memperkuat tekanan inflasi dan ketidakpastian produksi (ESDM, 2017).

Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), termasuk pedagang kaki lima, pedagang sayur, dan penjual hasil pertanian, sangat rentan terhadap kenaikan harga dan keterbatasan BBM (Melinda et al., 2024). Kenaikan biaya distribusi mendorong mereka menaikkan harga jual atau menurunkan margin, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat dan mengurangi volume transaksi (Elfita et al., 2025).

Dari sisi fiskal, ketergantungan pada subsidi BBM memperbesar risiko beban anggaran ketika harga minyak dunia melonjak atau cadangan nasional menipis (Uran, 2023). Program subsidi yang tidak tepat

sasaran dapat memperburuk defisit anggaran, menguras pos belanja negara, dan mengurangi ruang fiskal untuk investasi publik yang lebih produktif (PP No. 79/2014).

Secara eksternal, ketergantungan impor BBM juga berpotensi memperlemah neraca perdagangan dan menekan nilai tukar rupiah ketika harga minyak global naik. Kombinasi antara kenaikan harga energi impor dan penurunan penerimaan ekspor dapat mengurangi daya tahan perekonomian terhadap guncangan eksternal (Kurnia et al., 2025).

Di bidang investasi, kelangkaan BBM yang berkelanjutan dapat menciptakan ketidakpastian iklim usaha dan mengurangi daya tarik investasi di sektor manufaktur dan jasa yang intensif energi. Ketakutan terhadap gangguan pasokan, kenaikan biaya operasional, dan fluktuasi kebijakan energi dapat membuat investor lebih berhati-hati atau menunda ekspansi proyek. Ketidakpastian akibat kelangkaan BBM juga berdampak pada kepercayaan pelaku pasar, baik investor domestik maupun asing (Kurnia et al., 2025). Ketika kebijakan energi dinilai tidak stabil atau tidak dapat menjamin ketersediaan BBM, risiko peringkat kredit dan biaya modal dapat meningkat, sehingga memperberat biaya refinansial dan investasi baru (Ramadania et al., 2026).

Secara sosial-ekonomi, kelangkaan BBM cenderung memperlebar ketimpangan antar kelompok masyarakat, karena kelompok berpenghasilan rendah lebih sulit menyerap kenaikan harga dan biaya transportasi. Sebaliknya, kelompok berpenghasilan lebih tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengubah pola konsumsi dan mobilitas, sehingga tekanan distribusi menjadi tidak merata (Melinda et al., 2024).

Dalam kerangka kebijakan energi nasional, kelangkaan BBM juga menunjukkan celah dalam implementasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menekankan ketersediaan energi, efisiensi, dan pengurangan ketergantungan terhadap minyak bumi (PP No. 79/2014). Jika target diversifikasi energi dan pengembangan energi baru terbarukan tidak tercapai, perekonomian akan terus bergantung pada energi yang rentan terhadap gejolak harga dan gangguan rantai pasok (ESDM, 2017).

Dengan demikian, kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada kenaikan harga dan antrean di SPBU, tetapi juga merongrong stabilitas ekonomi makro, ketahanan fiskal, iklim investasi, serta ketimpangan sosial. Maka dengan itu, perlunya integrasi kebijakan energi, moneter, dan fiskal yang mampu menjaga ketersediaan BBM dalam jangka pendek sekaligus mempercepat transisi ke energi yang lebih berkelanjutan dan perekonomian yang lebih Tangguh.

### **Dampak Kelangkaan BBM terhadap Mobilitas Masyarakat**

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu penopang utama mobilitas masyarakat modern, karena sebagian besar aktivitas harian bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja, bersekolah, dan mengakses layanan publik. Ketika BBM menipis, mobilitas fisik masyarakat langsung terganggu, sehingga kualitas hidup dan akses terhadap sumber daya vital menjadi terbatas (Tambunan et al., 2022).

Kelangkaan BBM di SPBU seringkali memicu antrean panjang yang dapat berlangsung berjam-jam atau bahkan berhari-hari, seperti yang tercatat di beberapa wilayah di Bengkulu dan daerah lainnya (Sumenep Kab, 2025). Antrean ini tidak hanya menghambat waktu perjalanan, tetapi juga mengurangi efisiensi waktu dan produktivitas masyarakat, karena sebagian tenaga dan waktu terserap hanya untuk mendapatkan bahan bakar (Melinda et al., 2024). Bagi masyarakat yang mengandalkan sepeda motor dan kendaraan pribadi sebagai satu-satunya modal transportasi, keterbatasan BBM membuat mereka harus membatasi frekuensi perjalanan, mengurangi jarak tempuh, atau mengubah jadwal aktivitas sehari-hari

(Tambunan et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa kelangkaan BBM tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menurunkan ruang gerak sosial individu.

Pada sektor pendidikan, kelangkaan BBM dapat mengganggu mobilitas pelajar dan mahasiswa yang bergantung pada angkutan umum maupun kendaraan pribadi dari wilayah perdesaan dan pinggiran ke pusat-pusat pendidikan kota. Keterlambatan datang ke sekolah atau kampus akibat sulitnya mendapatkan BBM dapat mengganggu jalannya proses belajar-mengajar dan menurunkan konsentrasi siswa (Harahap, 2021).

Dari sisi kesehatan, keterbatasan BBM mempersulit akses pasien menuju fasilitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil yang sangat bergantung pada kendaraan darat (Pohan & Al-Farizi, 2023). Keterlambatan pengisian bahan bakar atau peningkatan biaya transportasi berpotensi menghambat pemeriksaan rutin, pengobatan, dan rujukan medis, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan. Bagi tenaga kerja, mobilitas yang terganggu akibat kelangkaan BBM dapat mengurangi kehadiran harian, menurunkan produktivitas, dan memperbesar risiko keterlambatan atau kehilangan pekerjaan (Pohan & Al-Farizi, 2023). Buruh harian, karyawan dengan jarak rumah–kerja jauh, serta pekerja lapangan yang mengandalkan angkutan bermotor menjadi kelompok yang paling terdampak secara langsung.

Di sektor transportasi publik, keterbatasan bahan bakar berpotensi menurunkan frekuensi trayek angkutan umum atau bus, karena operator berusaha mengurangi biaya operasional dan mengelola sisa stok BBM (Tambunan et al., 2022). Kondisi ini memaksa masyarakat yang dahulu mengandalkan layanan publik untuk beralih ke kendaraan pribadi yang lebih boros atau mengurangi perjalanan secara keseluruhan.

Dampak kelangkaan BBM juga terasa pada sektor pariwisata dan aktivitas sosial, karena wisatawan dan masyarakat mengurangi perjalanan rekreasi, kunjungan keluarga, dan acara-acara sosial yang membutuhkan mobilitas jarak jauh (Suraya et al., 2025a). Penurunan mobilitas ini tidak hanya mengurangi kualitas interaksi sosial, tetapi juga berdampak ekonomi pada pelaku usaha pariwisata dan kuliner di sepanjang rute perjalanan wisata.

Pada kelompok masyarakat dengan keterbatasan finansial, kenaikan harga BBM dan kelangkaan pasokan memperparah ketidaksetaraan akses mobilitas, karena mereka tidak memiliki alternatif transportasi yang cukup terjangkau (Harahap, 2021). Sebaliknya, kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi dapat menyesuaikan pola perjalanan dan menanggung kenaikan biaya, sehingga mobilitas sosial menjadi lebih tidak merata.

Kelangkaan BBM juga memicu perilaku adaptif, seperti pengurangan perjalanan non-esensial, peningkatan fasilitas berjalan kaki dan sepeda, serta konsolidasi perjalanan agar lebih efisien (Suraya et al., 2025b). Namun, perubahan ini tidak selalu mudah diimplementasikan, terutama di daerah dengan infrastruktur pejalan kaki dan jaringan transportasi umum yang terbatas.

Di ruang publik, keterbatasan BBM dapat memunculkan ketegangan sosial, seperti antrean panjang, praktik percaloan, hingga insiden kecil antar pengguna di SPBU (Suraya et al., 2025a). Kondisi ini menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bukan hanya persoalan distribusi barang, tetapi juga pemicu gejolak sosial dan tekanan psikologis masyarakat yang terus menunggu ketersediaan energi dasar.

Dari sisi perencanaan wilayah, ketergantungan berlebih terhadap BBM menunjukkan kelemahan dalam pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, seperti angkutan umum massal, jalur sepeda, dan integrasi antarmoda (Harahap, 2021). Kondisi mobilitas yang rentan terhadap krisis BBM menegaskan

perlunya urban planning yang mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi dan BBM berbasis fosil.

Secara jangka panjang, pola mobilitas yang terganggu akibat kelangkaan BBM dapat mendorong masyarakat untuk secara perlahan beralih ke moda transportasi yang lebih efisien dan ramah energi, seperti kendaraan listrik atau penggunaan transportasi umum yang lebih terstruktur (ESDM, 2017). Namun, perpindahan ini membutuhkan dukungan infrastruktur energi, kebijakan insentif, dan perubahan budaya mobilitas yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kelangkaan BBM tidak hanya menghambat pergerakan fisik masyarakat, tetapi juga merekonfigurasi pola akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ketahanan energi dan diversifikasi moda transportasi merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mempertahankan mobilitas sosial yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia telah memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi makro, terutama melalui pendorongan inflasi, kenaikan biaya produksi dan logistik, serta beban pada anggaran negara akibat ketergantungan pada subsidi BBM dan impor energi. Ketidakpastian pasokan dan volatilitas harga BBM juga mengganggu iklim investasi, menurunkan produktivitas sektor riil, dan memperlebar ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat, sehingga menggerus ketahanan perekonomian jangka panjang.

Di sisi lain, kelangkaan BBM berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, karena antrean panjang di SPBU, kenaikan biaya transportasi, dan penurunan frekuensi layanan angkutan umum mengurangi kemampuan individu untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta aktivitas sosial-kultural. Mobilitas yang terbatas ini paling dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat di daerah terpencil, sehingga menambah dimensi kesenjangan sosial di atas tekanan ekonomi yang sudah ada.

Secara keseluruhan, bahwa kebijakan energi nasional, khususnya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan berlebih terhadap BBM dan memitigasi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi serta mobilitas masyarakat. Untuk itu, diperlukan integrasi kebijakan yang lebih kuat antara sektor energi, transportasi, fiskal, dan perencanaan wilayah, dengan fokus pada diversifikasi energi, peningkatan efisiensi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penguatan moda transportasi umum yang lebih hemat energi guna membangun ketahanan ekonomi dan mobilitas sosial yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, D., Fadila, Z. N., Leonita, A., Uswatunnabila, A., Nurhaini, S., & Saputri, S. (2023). ANALYSIS OF THE EFFECT OF FUEL SUBSIDY POLICY ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 2(1), 105–115. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i1.313>
- Elfita, N., Ansolino, A., & Jolianis, J. (2025). Effect of Interest Rates, Rupiah Exchange Rate, Fuel Prices, Household Consumption, and Government Expenditure on Inflation and Money Supply in Indonesia. *Journal of English Language and Education*, 10(5), 1036–1044. <https://doi.org/10.31004/jele.v10i5.1400>

- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Harahap, N. K. (2021). ANALISIS KELANGKAAN BBM PREMIUM DI PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 56–76. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.3800>
- Kurnia, G. P., Meizaroh, Febrianto, M. A., & Marasabessy, R. M. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan dalam Kelangkaan BBM: Peran KPPU dan Regulasi Impor Satu Pintu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 284–303. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10554>
- Melinda, S., Novita, S., Rafiqoh, U. W., Sopariah, S., & Nugraha, D. A. (2024). Pemodelan Matematika dalam Efisiensi Pengisian Ulang Stok Bahan Bakar di SPBU Cikurubuk. *Cartesius: Jurnal Pendidikan Matematika*, 213–218.
- Pohan, F. R., & Al-Farizi, C. W. (2023). Dampak Implementasi Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Sektor Transportasi. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(2), 92–100.
- Qabil, C., Purba, C., Prabowo, M. S. P., Ernawati, N., Hanafiah, R. W., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). SINERGI TARIK ULUR KENAIKAN BBM, KEBIJAKAN STIMULUS PERPAJAKAN DAN DAMPAK EKONOMI. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 469–489.
- Ramadania, S. F., Tanaijo, W., & Yusuf, C. (2026). The Role of the IMF in Overcoming the 1998 Economic Crisis in Indonesia. *Economics Monetary Journal*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.64910/pq8gm877>
- Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford University Press.
- RIDIA MAHARANI, 1611021051. (2021). *PERGERAKAN BBM DAN KONDISI MAKROEKONOMI TERHADAP INFLASI 2005-2020* [Skripsi]. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. <https://digilib.unila.ac.id/60674/>
- Sa'diyah, S. S., Saepudin, E. A., Cahya, R., Rosita, S. L., & Ayun, N. Q. (2025). Kebijakan Subsidi BBM. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 286–293. <https://doi.org/10.63822/bbs6f165>
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Suraya, A., Putri, S. Z., & Kamaly, N. (2025a). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MYPERTAMINA DALAM PENYALURAN BBM BERSUBSIDI PADA MASYARAKAT ACEH. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(3), 619–632. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2155>
- Suraya, A., Putri, S. Z., & Kamaly, N. (2025b). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MYPERTAMINA DALAM PENYALURAN BBM BERSUBSIDI PADA MASYARAKAT ACEH. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(3), 619–632. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2155>
- Tambunan, N., Aprilia, S., & Rahayu, N. P. (2022). STUDY LITERATURE: DAMPAK KENAIKAN BBM BAGI PEREKONOMIAN RAKYAT. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 329–336. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.550>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). (2017). *Implementasi kebijakan ekonomi dan energi nasional*. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300. <https://peraturan.go.id/eng/pp-no-79-tahun-2014>